

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap kalangan mulai dari kalangan masyarakat umum, mahasiswa, rumah tangga maupun pelaku bisnis. Seluruh masyarakat dari berbagai kalangan wajib melakukan pengelolaan keuangan agar dapat menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan optimal khususnya bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya tentu wajib melakukan pengelolaan keuangan agar dapat mengetahui omset penjualan dan tingkat pendapatan yang diperoleh. UMKM merupakan usaha dijalankan oleh individu, industry perseorangan, rumah tangga maupun badan usaha berukuran kecil yang mana UMKM dikelompokkan berdasarkan omzet per tahun, jumlah karyawan serta jumlah kekayaan atau asset. Di Indonesia, khususnya di Bali UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian negara. Melansir dari media Kompas.com (money.kompas.com) sektor UMKM merupakan penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar dan paling banyak menyerap lapangan kerja serta relative tahan terhadap krisis keuangan. Adapun data jumlah UMKM di Provinsi Bali dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. 1Jumlah UMKM di Provinsi Bali

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM
Kota Denpasar	97.452
Kab. Badung	7.879
Kab. Gianyar	6.586
Kab. Bangli	533
Kab. Klungkung	5.555
Kab. Buleleng	1.269
Kab. Jembrana	2.236
Kab. Karangasem	480
Kab. Tabanan	43.715
Total	165.615

(Sumber: Kemenkopumkm.go.id)

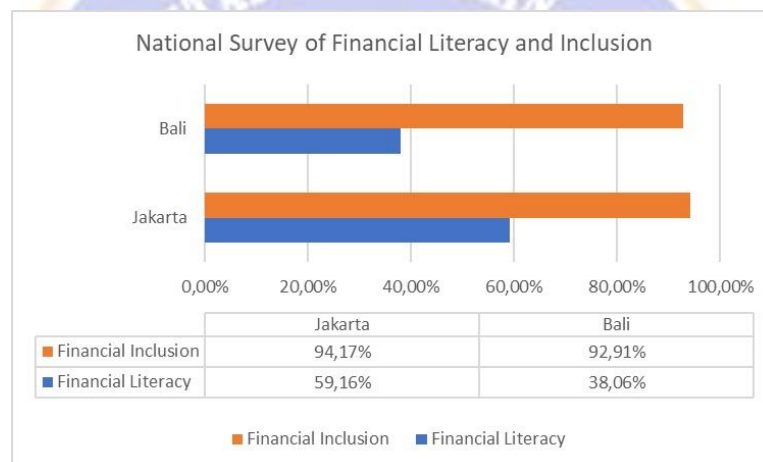
Pada sektor UMKM, masih banyak pemilik dari UMKM yang tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, individu yang baru memulai bisnis dan masih tergolong sektor UMKM seperti tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik dan benar dan tidak membedakan uang bisnis dengan uang pribadi sehingga pelaku bisnis tidak dapat melakukan evaluasi dan target untuk perencanaan bisnis di masa mendatang yang bisa saja menyebabkan kerugian pada usaha yang digeluti dan susah untuk memperoleh kredit dari perbankan karena tidak memiliki struktur pembukuan yang rapi dan tidak sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Permasalahan keuangan merupakan salah satu permasalahan krusial yang biasanya dialami oleh berbagai sektor tidak terkecuali sektor UMKM. Pelaku bisnis harus mampu dalam mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya dilakukan oleh pelaku UMKM. Pengelolaan keuangan memiliki peranan penting dalam sebuah usaha untuk

mempertahankan kondisi dan kinerja keuangan dalam berbagai situasi ekonomi yang tengah terjadi karena salah satu tujuan usaha adalah untuk mendapatkan profit yang diinginkan sehingga pelaku UMKM harus bisa mengelola uang secara cermat. Namun pada kenyataannya, perihal kinerja keuangan bagi pelaku UMKM masih dianggap sepele dan diabaikan karena biasanya pelaku UMKM hanya focus pada bagian produksi dan pemasaran. Dikutip dari (ekonomi.bisnis.com) bahwa penyaluran kredit memang kerap terjadi kendala karena literasi keuangan yang minim. Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara juga berpendapat bahwa pencatatan atau pembukuan bisnis kerap menjadi alasan UMKM untuk memperoleh kredit dari perbankan. Memiliki kinerja keuangan yang baik dapat menjadi kunci sukses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sumber pendanaan secara eksternal. Sektor UMKM yang dewasa ini menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan bisnis yang berhubungan sesuai dengan usaha yang digeluti untuk memberikan value added pada nilai bisnis yang sudah ada termasuk dalam pendanaan yang bukan hanya perolehan modal saja tetapi diimbangi dengan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, literasi keuangan sangat dibutuhkan di era globalisasi. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam studinya di PISA, mengungkapkan literasi keuangan dalam arti luas yakni sebagai berikut.

“Financial literacy is knowledge and understanding of financial concepts and risks, and the skills, motivation and confidence to apply such knowledge and understanding in order to make effective decisions across a range of financial contexts, to improve the financial well-being of individuals and society, and to enable participation in economic life”.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id) bahwa tingkat keuangan literasi di Indonesia di klasifikasikan menjadi beberapa bagian yakni : well literate dengan

persentase 21.84%, sufficient literate dengan persentase 75.69%, less literate dengan persentase 2.06% dan not literate 0.41%. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik masih terbilang cukup rendah sehingga perlunya himbauan terkait dengan literasi keuangan. Melansir dari survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id) bahwa Provinsi Bali memiliki persentase literasi keuangan yang rendah yakni 38.06% dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi mencapai 92.92% yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini



*Gambar 1.1 Persentase Literasi dan Inklusi Keuangan
(Sumber: ojk.go.id)*

Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Bali masih membutuhkan literasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu, literas keuangan juga diperlukan mengingat Provinsi Bali memiliki tingkat inklusi keuangan yang cukup tinggi yang berarti Provinsi Bali memiliki ketersediaan akses produk, jasa dan lembaga keuangan terlebih lagi pada era digitalisasi tentunya produk jasa dan lembaga keuangan menghadirkan berbagai inovasi untuk dapat melayani akses keuangan secara lebih

efektif dan efisien. Dewasa ini, teknologi informasi semakin berkembang pesat sehingga menciptakan inovasi terkini mulai dari software hingga hardware dan perangkat pendukung lainnya. Perkembangan teknologi informasi tentunya didukung dengan adanya gadget, internet dan gaya hidup mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Pada era digitalisasi, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat hingga di tahun 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai 196 juta jiwa atau sekitar 72% dari total penduduk Indonesia (Slamet, 2021). Perkembangan teknologi informasi mengajak seluruh sector mulai dari sector pendidikan, politik, social bahkan sampai dengan sector perekonomian untuk beralih menggunakan media digital sebagai penunjang hampir seluruh kegiatan yang dilakukan. Inovasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat maupun pelaku bisnis sehingga menjadi sebuah trend yakni penggunaan fintech (financial technology). Fintech merupakan salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan di sector perekonomian dalam melakukan berbagai transaksi sehingga waktu yang digunakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Hadirnya inovasi teknologi keuangan yang biasa disebut dengan “fintech” berasal dari perubahan gaya hidup masyarakat yang mana penyerapan teknologi informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam penggunaannya, FinTech memiliki beberapa klasifikasi diantaranya crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer Lending, market comparison, dan payment gateway. Jenis layanan FinTech yang sangat terkenal dan paling sering digunakan baik oleh masyarakat maupun pelaku bisnis adalah peer-to-peer lending dan payment gateway. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Dalam Lestari, Purnamasari, & Setiawan, 2020) persentase penggunaan Fintech di Indonesia yang marak digunakan yakni payment gateway

sebanyak 42,22%; peer to peer lending sebanyak 17,78. Di era digitalisasi, FinTech sudah mulai digunakan oleh hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia tidak terkecuali pelaku UMKM yang tentunya juga ikut memanfaatkan fintech dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Dengan menggunakan layanan yang disediakan pada Fintech, pelaku UMKM juga dapat terbantu mulai dari transaksi penjualan yang dapat dilakukan dengan pembayaran digital, melakukan peminjaman dana sebagai modal usaha pelaku UMKM tanpa jaminan dan agunan serta memilih jenis platform fintech yang akan digunakan dengan untuk alat pembayaran secara digital. Berdasarkan riset yang terdapat pada Ease of Doing Business 2020 yang dilansir dari (ekonomi.bisnis.com) bahwa Indonesia menempati peringkat ke-48 dalam hal kemudahan memperoleh kredit bagi UMKM.

Penggunaan fintech ini sangat sesuai digunakan untuk situasi dan kondisi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam bidang perekonomian. Melansir dari (kontan.co.id) Pemerintah menyadari pentingnya fintech yang juga dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis. Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Masduki bilang fintech bisa mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi operasional usaha dan mempermudah akses pembiayaan modal kerja. Pertumbuhan UMKM masih tergolong lambat dikarenakan berbagai kendala seperti pendanaan, sistem pembayaran, keterbatasan pengetahuan mengenai fintech sehingga cara yang hal tersebut masih banyak dilakukan secara konvensional dan literasi keuangan yang masih rendah. Kendati demikian, tidak sedikit pelaku UMKM di Provinsi Bali mulai beralih menuju digitalisasi sebagai penunjang keberlanjutan usaha dari pelaku UMKM. Dalam penggunaannya fintech memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang mana menurut penelitian Urba, Yuliani, & Umrie (2019)

menunjukkan pendanaan UMKM memiliki perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Fintech dikarenakan kemudahan dan proses yang cepat menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan melakukan peminjaman melalui Fintech. Penelitian Lestari, Purnamasari, & Setiawan (2020) juga menjelaskan bahwa payment gateway memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan UMKM. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Peer-to-peer (P2P) Lending, dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Provinsi Bali”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang sering terjadi pada UMKM sebagai berikut:

1. UMKM belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik sehingga terkendala terhadap akses permodalan.
2. Literasi Keuangan di Provinsi Bali masih sebanyak 38.06%
3. Inklusi Keuangan di Provinsi Bali mencapai 92.91%
4. Penggunaan Peer to Peer Lending oleh pelaku UMKM masih sebanyak 17,78%
5. Penggunaan Payment Gateway oleh pelaku UMKM masih sebanyak 42,22%
6. Merujuk pada penelitian Urba, Yuliani, & Umrie (2019) memaparkan bahwa pendanaan UMKM memiliki perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Fintech.

7. Merujuk pada penelitian Lestari, Purnamasari, & Setiawan (2020) juga menjelaskan bahwa payment gateway memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan UMKM

1.3 Pembatasan Masalah

Isu tersebut dipersempit menjadi fokus pada isu kinerja keuangan UMKM terkait literasi keuangan, peer-to-peer lending, dan Payment Gateway. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, peer-to-peer lending dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Bali.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali?
2. Apakah Peer to Peer (P2P) Lending berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali?
3. Apakah Payment Gateway berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Provinsi Bali
2. Mengetahui Peer to Peer (P2P) Lending berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali.

3. Mengetahui Payment Gateway berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Provinsi Bali.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi mengenai dampak literasi keuangan peer-to-peer lending dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Bali. Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai referensi literatur atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pelaku UMKM dalam mengambil keputusan penggunaan fintech pada usaha yang digeluti.

